ARTIKEL

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG DESENTRALISASI FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN

Oleh:

ELISABETH FARA SILAP

14.1.02.02.0028

Dibimbing oleh :

1. **Ismayantika Dyah P, SE., M.B.A**
2. **Hery Purnomo, M.M**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: ELISABETH FARA SILAP
NPM	: 14.1.02.02.0028
Telepun/HP	: 085749427200
Alamat Surel (Email)	: Elisabethfara1705@gmail.com
Judul Artikel	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Untuk Pembangunan
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi-Manajemen
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) Telp. (0354) 771576, Fax. 771576

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 15 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Ismayantika Dyah,SE., M.B.A **NIDN. 0706108902**	**Hery Purnomo, M.M.** **NIDN. 9907006460**	**Elisabeth Fara Silap** **NPM. 14.1.02.02.0028**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Untuk Pembangunan

Elisabeth Fara Silap
14.1.02.02.0028
Ekonomi – manajemen
Elisabethfara1705@gmail.com
Nama Dosen Pembimbing : 1. Ismayantika Dyah P, S.E., M.B.A
Nama Dosen Pembimbin : 2. Hery Purnomo, M.M.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRACT

The large contribution of PAD in the APBD is a measure of the success of the implementation of development, improving services, and improving the welfare of the community. Decentralization is the delegation of authority from the central government to local governments to manage their regions. The implementation of fiscal decentralization which is based on PAD must be pursued optimally because the regional government cannot carry out its functions effectively and efficiently without sufficient costs to finance government services and development area.

The objectives of this research are: (1) To analyze the role of local revenue in supporting fiscal decentralization for development. To show the financial capacity of the Kediri regency in financing their own household. (2) By using the degree of fiscal decentralization, in particular local revenues to the APBD, which can show the independence of the regional government towards development in the form of ratios.This study uses a quantitative approach. The technique in this study was carried out descriptively. The data used is temporary data and data after calculation from the recapitulation of the report on regional revenue realization.

The conclusion of this study is the construction of the Gumul Simpang Lima (SLG), Kusuma Wijaya Bridge or the Ngadiluwih Bridge, the construction of roads, hospitals, etc. It can be concluded that the development carried out for Kediri regency seen from the calculation of the degree of Fiscal Decentralization, especially local revenues against the APBD, can show the independence of the regional government towards development in the form of a ratio that results in the PAD ratio to the APBD.

Keywords: *Regional Original Revenue, Fiscal Decentralization, Regional Development.*

ABSTRAK

Besarnya kontribusi PAD dalam APBD merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur pada PAD harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa baiaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yng dilakukan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal untuk pembangunan. untuk memperlihatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kediri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. (2) Dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal khususnya pendapatan asli daerah terhadap APBD yang dapat memperlihatkan kemandirian pemerintah daerah terhadap pembangunan dalam bentuk rasio.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tehnik dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sementara dan data setelah perhitungan dan rekapitulasi laporan realisasi pendapatan daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG), Jembatan Wijaya Kusuma atau disebut Jembatan Ngadiluwih, pembangunan jalan, rumah sakit dsb. Hal ini dapat didimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan untuk kabupaten Kediri dilihat dari perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal khususnya pendapatan asli daerah terhadap APBD dapat memperlihatkan kemandirian pemerintah daerah terhadap pembangunan dalam bentuk rasio yang menghasilkan Rasio PAD terhadap APBD.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Daerah.*

I. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah daerah, kepemilikan hak dan kewajiban pengaturan mengenai msayarakat dan daerah yang sudah menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut. Selain hak mengatur, daerah sekaligus mempunyai kewajiban yang terdapat pada Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang berarti dengan adanya undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintah mulai dari evaluasi, perencanaan dan pengendalian, sehingga dapat memotivasi Pemerintah.

Kabupaten Kediri 2013-2015 berdasarkan sumber pendapatan daerah yaitu PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain. Pada Tahun 2015 kabupaten Kediri mencetak Sumber Pendapatan tertinggi senilai Rp. 2.317,50 Miliar yang berarti memiliki kesempatan untuk mengembangkan bermacam potensi sektor lainnya yang ada. Tetapi Kabupaten Kediri ternyata masih mengandalkan dana perimbangan dari Pemeritah Pusat dan tidak ada kenaikan yang melebihi dana perimbangan dari Pendapatan Asli Daerah. Ini membuktikan bahwa kinerja pajak di Kabupaten Kediri dan Badan Usaha Milik Daerah menyumbang pendapatan yang sangat kecil bagi Kabupaten Kediri. Hal positif yang bisa diambil dari data yang bersifat sementara ini yaitu Sumber Pendapatan untuk Kabupaten Kediri tiap tahunnya meningkat dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mengembangkan sektor yang belum disentuh oleh Pemerintah Daerah.

II. METODE

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan kuantitatif, menurut Kasiram dalam Sujarweni (2014:39) “penelitain kuantitatif” adalah “suatu langkah menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis”.

Tehnik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, menurut Arikunto

(2010:3), metode "deskriptif " adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki keadaaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Kediri dan waktu penelitian ini berlangsung selama lima bulan yaitu Maret-Juni 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan objek yang diteliti yaitu total PAD dan APBD.

D. Tehnika anlsis data

Dalam penelitian ini menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

2. Rasio PAD terhadap APBD
   1. Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00% (Sangat Kurang)
   2. Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
   3. Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,005% (Sedang)
   4. Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00 (Cukup)
   5. Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)
   6. Rasio PAD Terhadap APBD 50,00% (Sangat Baik)

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Rasio Derajat Desentralisasi

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

$$DDF = \frac{291.774.545.930,40}{2.490.386.442.767,40}$$

$$DDF = 0.1171603494621383$$

Kesimpulan pada tabel diatas jumlah Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2016 sebesar 0.1171603494621383

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

$$DDF = \frac{272.923.275.262,40}{2.129.355.576.835,40}$$

$$DDF = 0.1281717709486606$$

Kesimpulan pada tabel di atas jumlah Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2015 sebesar 0.1281717709486606.

B. Rasio PAD Terhadap APBD

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

$$DDF = \frac{291.774.545.930,40}{2.490.386.442.767,40}$$

$$DDF = 0.1281717709486606$$

Kesimpulan Rasio PAD terhadap APBD tahun 2016 yaitu 0.1171603494621383% (Sangat Kurang).

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

$$DDF = \frac{272.923.275.262,40}{2.129.355.576.835,40}$$

$$DDF = 0.1281717709486606$$

Kesimpulan Rasio PAD terhadap APBD tahun 2015 yaitu 0.1281717709486606% (Sangat Kurang).

C. Pembahasan

1. Setelah melakukan penelitian untuk mengukur seberapakah ketergantungan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunkan perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal dari data Rekapitulasi. Laporang Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015-2016. Dari data tahun 2015 menghasilkan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 0.1171603494621383.
2. Dapat dilihat dari perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Khususnya Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD dapat memperlihatkan kemandirian pemerintah daerah terhadap pembangunan dalam bentuk rasio yang menghasilkan Rasio PAD terhadap AOBD pada tahun 2016 yaitu 0.1171603494621383% (Sangat Kurang).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil pengambilan dan pengelolaan data pada Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri serta pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu dengan adanya perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal. Terhitung pada data tahun 2015 dibulatkan

sebesar 0.128 yang diwujudkan dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Dan data tahun 2016 dibulatkan sebesar 0.117 yang diwujudkan melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Pembangunan yang dilakukan untuk kabupaten kediri dilihat dari perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal khususnya pendapatan asli daerah terhadap APBD dapat memperlihatkan kemandirian pemerintah daerah terhadap pembangunan dalam bentuk rasio yang menghasilkan Rasio PAD terhadap APBD pada tahun 2016 yaitu 0.117% (Sangat Kurang). Dan pada tahun 2015 yaitu 0.128% (Sangat Kurang). Seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat, pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) menjadi ikon dari Kabupaten Kediri yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Dan hal tersebut dapat menambah nilai dari sektor pariwisata. Pembangunan lainnya yaitu berupa Jembatan Wijaya Kusuma atau disebut Jembatan Ngadiluwih dibangunnya jembatan tersebut menjadikan prospek ekonomi lokal semakin baik. Serta pembangunan jalan, rumah sakit, dsb.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu perizinan usaha dipermudah agar dapat menambah pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai bahan masukan agar dapat mengetahui tingkat ketergantungan fiskal terhadap subsidi pusat. Dapat menggunakan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio PAD terhadap APBD.

V. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik.2015. *Statistik Kabupaten Kediri*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPK-BMD.2014. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013*. Manado.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

Laporan Realisasi Bulanan Badan Pendapatan Daerah Kab Kediri

.